INDOTEXTILES
The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference

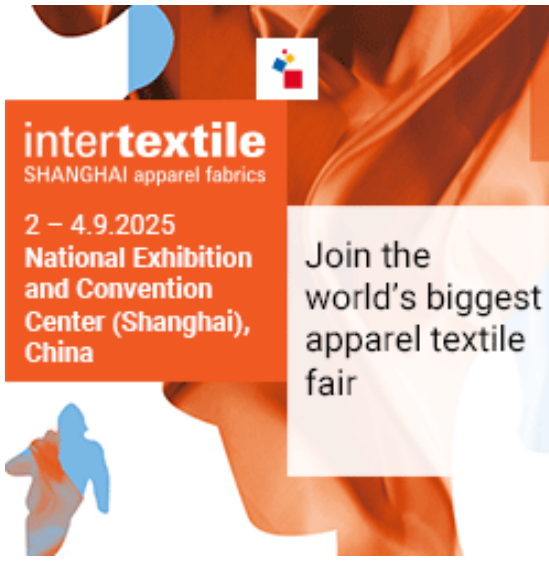

Momentum dan Mendorong Inovasi Global di Industri Mode dan Tekstil

Industri tekstil saat ini tengah menghadapi lanskap bisnis yang terus berubah, lengkap dengan berbagai tantangan. Namun, kondisi yang dinamis ini juga membuka peluang besar, didorong oleh meningkatnya permintaan dari pasar berkembang, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Untuk membantu pelaku industri beradaptasi dan menemukan jalur pertumbuhan, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition akan digelar pada 2 – 4 September 2025 di National Exhibition and Convention Center, Shanghai.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung domestik dan internasional dalam beberapa edisi terakhir, pameran ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil dan pertukaran inovasi terdepan di dunia.

Tiga Dekade Keunggulan: Memasuki Babak Keempat Intertextile Apparel :Edisi musim gugur 2024 menandai perayaan 30 tahun

Intertextile, dengan hampir 4.000 peserta pameran dari 26 negara dan wilayah, serta kunjungan lebih dari 100.000 orang — jumlah pengunjung internasional naik 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum ini berlanjut di edisi musim semi 2025, yang mencatat hampir 95.000 pengunjung dari 131 negara dan wilayah, atau naik 17%.

Ms Wilmet Shea, General Manager Messe Frankfurt (HK) Ltd, menekankan pentingnya pameran ini: “Pertumbuhan Intertextile dari dekade ke dekade membuktikan kemampuannya menghubungkan pemasok global dengan pembeli visioner. Meski pasar saat ini penuh ketidakpastian, jangkauan internasional pameran ini justru membuka peluang bisnis di seluruh rantai nilai tekstil. Fokus kami pada inovasi dan tren desain terbaru menjadi komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital. Ini terlihat di berbagai zona khusus, seperti Digital Solutions Zone, Premium Wool Zone, dan Verve for Design, yang menjadi tempat penting bagi pembeli untuk tetap mengikuti perkembangan. Sementara itu, inisiatif Texpertise Econogy memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital — dua pilar masa depan industri.”

Sebagai salah satu platform pengadaan terbesar di industri ini, Intertextile Apparel terus menjadi pusat tren global melalui zona-zona beragam, seperti Accessories Vision, Beyond Denim, Functional Lab, dan SalonEurope. Di edisi 2024, dua zona baru juga diluncurkan: Econogy Hub, yang fokus pada solusi berkelanjutan, dan Digital Solutions Zone, sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan AI, blockchain, dan IoT dalam rantai pasok — yang kini membantu meningkatkan transparansi, mengurangi limbah lewat sampling virtual 3D, dan mengoptimalkan logistik dengan analitik prediktif.

Digital Solutions Zone: Wadah Inovasi Digital : Digital Solutions Zone dan sesi seminar terkait kini menjadi pilihan utama bagi peserta pameran seperti Quaternion, Shima Seiki, dan Symmpix, yang menampilkan inovasi seperti peramalan permintaan berbasis AI, sampling virtual 3D (yang dapat mengurangi limbah kain hingga 30%), dan paspor produk digital untuk mendukung praktik pengadaan yang etis.

Mr Herman Chan, General Manager Symmpix, mengatakan “Zona ini sangat sesuai dengan arah pengembangan kami. Kami bertemu pembeli yang mencari solusi transformasional — mulai dari AI generatif untuk desain hingga sistem produksi yang dipersonalisasi. Bahkan di hari pertama, kami sudah terhubung dengan klien yang ingin langsung mengaplikasikan solusi ini dalam bisnis mereka.”

Premium Wool Zone: Merespons Tren Pakaian Kustom dan Bahan Mewah : Meningkatnya posisi China sebagai produsen pakaian kustom kelas dunia telah mendorong permintaan akan kain mewah, baik dari individu maupun merek yang mengutamakan pakaian unik, penuh gaya, dan berkelas. Premium Wool Zone, yang identik dengan warisan dan kualitas, bersama Paviliun Milano Unica, menghadirkan 50 peserta pameran wol premium di zona SalonEurope. Beberapa nama ikonik yang tampil termasuk Abraham Moon & Sons (UK), Albini (Italia), Cavallo 1886 (Italia), dan Scabal NV/SA (UK) — semuanya memamerkan kain Eropa berkualitas tinggi yang sangat diminati pembeli asal Tiongkok.

Mr Federico Veronese, Sales Manager E.Thomas S.p.A, : “Sejak pertama kali ikut di tahun 1998, Intertextile Apparel sangat penting bagi kami. Kerjasama di industri tekstil itu vital, dan pameran ini membuka jalan bagi kami untuk terhubung dengan

pelanggan di Tiongkok. Italia dikenal dengan produk wol berkualitas tinggi dan kreatif. Pasar Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami berencana terus berinvestasi di sana."

Premium Wool Zone pun terus berinovasi. Di edisi musim gugur tahun ini, area khusus Functional Suiting Display akan kembali dihadirkan, memungkinkan peserta pameran menampilkan lebih banyak potensi dan fleksibilitas material mereka.

Verve for Design: Jembatan Kreativitas Global dan Pasar Lokal : Verve for Design, yang menjadi wadah bagi tren pola dan motif terkini, kini menarik perhatian dunia mode Tiongkok, di mana para desainer muda mencari pola unik untuk mewujudkan ide kreatif mereka. Studio-studio seperti Atelier Mineeda (Jepang), Longina Phillips Designs (UK), dan PHN Studio (Argentina) ikut berpartisipasi, menghubungkan kreativitas global dengan kebutuhan lokal yang dinamis.

Ms Lucia Mu, Pattern Consultant PHN Studio, mengungkapkan "Arus pengunjung di Intertextile luar biasa. Kami terhubung dengan klien dari Tiongkok hingga Amerika Selatan yang mencari desain berkelanjutan — banyak dari mereka menggabungkan motif eco-friendly kami dengan bahan mereka sendiri untuk menciptakan koleksi yang berkesan."

Musim gugur ini, zona ini akan kembali memberikan kesempatan bagi desainer dan studio dari seluruh dunia untuk bertemu langsung dengan produsen pakaian dan merek baru yang tengah mencari motif-motif inovatif.

Pameran ini diselenggarakan oleh Messe Frankfurt (HK) Ltd, Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, dan China Textile Information Centre. Akan digelar bersamaan dengan Yarn Expo Autumn, CHIC, dan PH Value di National Exhibition and Convention

Center, Shanghai — menghadirkan keseluruhan rantai nilai industri tekstil dalam satu lokasi.

Info lebih lanjut: www.intertextileapparel.com

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition 2025

Tanggal: 2 – 4 September 2025

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-92

Berita Utama

- Industri Tekstil Terpuruk, APSyFI Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Impor Ilegal

Berita Terbaru

- BBSPJI Tekstil Teguhkan Komitmen Tata Kelola Bersih Lewat Penguatan Budaya Anti-Fraud
- Keren, Karya Kriya Tekstil dan Fashion Tel-U Pernah Kolab Bareng Desainer Ternama
- Lenuta Perkuat Kolaborasi Industri Tekstil dan Perhotelan Lewat Praktik Produksi Berkelanjutan
- IPKB Dukung Langkah Pemerintah Kendalikan Impor Ilegal demi Kebangkitan Industri Konveksi Nasional
- Pemerintah Terapkan BMTP untuk Perkuat Daya Saing Industri Tekstil Nasional
- API Waspadai Implementasi Kebijakan Bea Masuk Benang Kapas, Minta Pemerintah Konsisten di Lapangan
- Pedagang Thrift Pasar Senen Nilai Pakaian Lokal Kalah Kualitas dari Impor

- Pemerintah Pacu Pertumbuhan Industri Tekstil Lewat Lima Strategi Utama
- Investasi Asal China Perkuat Industri Tekstil di Jepara, Serap Ribuan Tenaga Kerja
- Industri Tekstil Indonesia Sedang Beradaptasi, Bukan Melemah
- De Licacy Industrial Asal Taiwan Investasikan US$1,1 Juta untuk Bangun Pabrik di Indonesia
- Serbuan Tekstil Ilegal Tanpa Merek Ancam Kelangsungan Industri Lokal
- Kemenperin Nilai Kontraksi IKI Tekstil Oktober 2025 sebagai Penyesuaian Normal di Pasar Global
- Indonesia Diperhitungkan Jadi Pusat Inovasi Tekstil Dunia
- Langkah Pembatasan Impor Pakaian Bekas Dinilai Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional

BERITA UTAMA

Industri Tekstil Terpuruk, APSyFI Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Impor Ilegal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyoroti maraknya praktik impor ilegal yang ditengarai merugikan negara hingga mencapai Rp54 triliun per tahun. Aktivitas ini disebut telah menekan sektor industri dalam negeri,

terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), yang berujung pada banyaknya perusahaan gulung tikar serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun 2022.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari International Trade Centre, terdapat sekitar 10.000 kontainer per bulan yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat di Bea Cukai. Hal ini diungkapkan Redma melalui surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan nomor 098/APSyFI/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

Menurut Redma, ketidaksesuaian data perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra seperti China dan Singapura menunjukkan tingginya volume barang impor ilegal yang lolos tanpa tercatat. Selain menyebabkan kerugian fiskal besar, kondisi tersebut menciptakan persaingan pasar yang tidak sehat dan menurunkan tingkat utilisasi produsen dalam negeri. Dampaknya, banyak perusahaan tekstil, alas kaki, hingga elektronik terpaksa mengurangi produksi bahkan menutup usahanya.

Dalam surat tersebut, APSyFI juga meminta kesempatan audiensi dengan Menkeu bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk membahas langkah penyelamatan industri tekstil nasional yang dinilai telah berada di ambang krisis. Redma menegaskan perlunya pemerintah memahami multiplier effect dari kebijakan perdagangan yang tidak berpihak pada produsen lokal.

Lebih lanjut, Redma menjelaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurutnya, DJBC belum menerapkan sistem port-to-port manifest yang menghubungkan data antara pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Akibatnya, importir nakal dapat melakukan

misdeclare seperti under invoicing dan penyalahgunaan kode HS, dengan mudah lolos lewat jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik.

Selain itu, penggunaan teknologi pemindai berbasis kecerdasan buatan (AI Scanner) di pelabuhan juga dinilai masih minim. Banyak kontainer yang masuk tanpa pemeriksaan memadai dengan alasan mempercepat dwelling time. Redma mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah oknum petugas Bea Cukai bahkan enggan menggunakan teknologi tersebut.

APSyFI juga menyoroti kebijakan fasilitas impor yang berlebihan seperti Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB), dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) yang tidak disertai pengawasan memadai. Kondisi ini disebut membuka ruang luas bagi penyalahgunaan fasilitas impor oleh pihak tertentu.

Selain itu, aturan terkait barang kiriman dan barang bawaan penumpang yang terlalu longgar turut dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak. Celah-celah ini, menurut Redma, memperkuat jaringan mafia impor ilegal yang melibatkan oknum importir, jasa logistik, petugas Bea Cukai, hingga aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi kebocoran tersebut, APSyFI mengusulkan beberapa langkah konkret, di antaranya penerapan sistem Electronic Data Interchange (EDI) port-to-port manifest yang menjadikan Master Bill of Lading sebagai dokumen utama Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan kesesuaian data antara dokumen dan isi kontainer.

Redma juga mendorong pemerintah mewajibkan penggunaan AI Scanner di seluruh pelabuhan utama serta membatasi fasilitas impor hanya untuk tujuan ekspor, yakni Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah penyalahgunaan fasilitas impor.

Ia berharap Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan membuka ruang dialog untuk membahas solusi penyelamatan industri tekstil nasional yang kini berada di titik kritis.

“Kami memohon agar dapat beraudiensi dengan Bapak Menteri Keuangan demi menyelamatkan industri tekstil saat ini,” pungkas Redma.

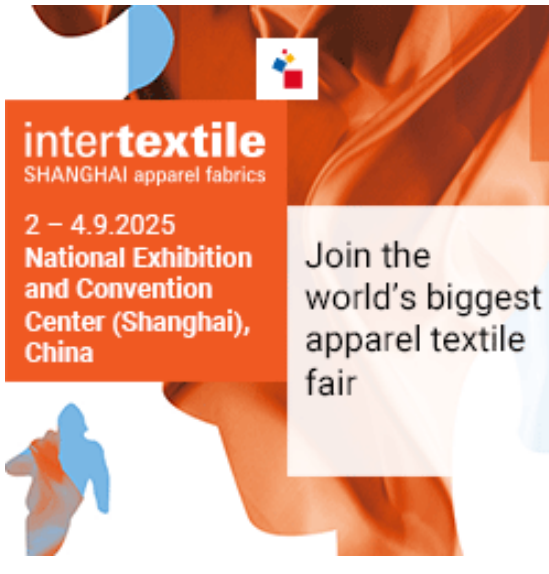

BERITA TERBARU

BBSPJI Tekstil Teguhkan Komitmen Tata Kelola Bersih Lewat Penguatan Budaya Anti-Fraud

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Salah satu langkah nyatanya ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan fraud yang digelar sebagai upaya strategis untuk menanamkan budaya anti-korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pada Kamis (9/10/2025), BBSPJI Tekstil berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Sosialisasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi dalam Rangka Pencegahan Fraud dan Penyimpangan di Lingkungan Kemenperin". Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh pegawai terhadap peran Inspektorat dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diajak memahami bahwa upaya pencegahan fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, melainkan juga seluruh individu di lingkungan kerja. Dengan keterlibatan aktif setiap pegawai, budaya kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung

jawab dapat tumbuh secara berkelanjutan, membentuk fondasi kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian RI, Brigadir Jenderal Polisi Diki Budiman, turut hadir dan memberikan apresiasi atas komitmen serta kedisiplinan pegawai BBSPJI Tekstil. Menurutnya, kesiapan dan keseragaman sikap seluruh pegawai mencerminkan semangat tinggi untuk menjaga integritas lembaga.

“Dari sisi tampilan dan kesiapan, kesatuan ini luar biasa. Begitu pula dengan kedisiplinan para pegawainya,” ujar Brigjen Pol. Diki Budiman.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif mengenai penerapan prinsip good governance serta strategi membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melalui dialog terbuka ini, peserta memperoleh wawasan praktis dalam mencegah potensi penyimpangan di setiap lini kerja.

Sebagai bagian dari agenda kegiatan, tim Inspektorat Investigasi juga melakukan peninjauan terhadap berbagai layanan dan fasilitas di lingkungan BBSPJI Tekstil. Langkah ini sekaligus memperkuat implementasi prinsip Zero Tolerance for Fraud yang menjadi komitmen utama Kemenperin dalam menciptakan birokrasi industri yang bersih, efisien, dan berintegritas tinggi.

Keren, Karya Kriya Tekstil dan Fashion Tel-U Pernah Kolab Bareng Desainer Ternama

Selain tampil di berbagai even, baik nasional maupun internasional, karya para mahasiswa

Kriya Tekstil dan fashion Telkom University (Tel-U), juga pernah diajak kolaborasi oleh salah satu desainer ternama.

“Beberapa desainer tertarik dengan karya teman-teman mahasiswa, sampai ada yang kolaborasi juga. Seperti kemarin dibawa ke In2motion Festival, ada desainer fashion mas Aam yang punya Kekean Wastra Gallery. Dia kolaborasi sama tim mahasiswa kita, dia support nih kain Wastra, bisa dibikin batik, tenunnya,” beber M. Sigit Ramadhan, Ketua Prodi Kriya Tekstil dan Fashion disela event SWASTAMITA 2025 di Corner Store Paskal 23 Bandung.

Swastamita mengangkat tema RITES DISRUPTED: Fragments of the Past, menurut Sigit, pihaknya ingin mengambil beberapa kepingan-kepingan masa lalu dari tradisi nusantara, mulai dari ornamen, kain-kain wastranya, yang memang terkenal dan menjadi tradisi.

“Kita coba munculkan kembali dengan visual berbeda dan penyajian yang baru,” ucapnya.

SWASTAMITA 2025 menekankan upaya kolaboratif baik dari komunitas maupun industri.

“Kita coba berkolaborasi, dimana karya-karya yang ditampilkan kali ini juga hasil kolaborasi dengan komunitas industri,” ujarnya.

Dikatakan, ada pengrajin di Tuban, cenderung kesulitan dalam pengembangan

desain, packagingnya. Mereka hanya menghasilkan kain-kain lembaran.

“Jadi kita coba bantu para pengrajin, dimana desainnya pun bisa mereka gunakan, untuk dijual juga bisa. Karena kecendrungan mereka terus bikin kain-kain, lembaran-lembaran, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan kesana,” paparnya.

Sementara di industri, produsen kain denim misalnya Gamatex memiliki beragam jenis kain.

“Dengan kolaborasi seperti ini, sebenarnya memberikan pengalaman kepada mahasiswa, mereka punya tanggung jawab mengembangkan peran mereka sebagai desainer,” tambahnya.

Hasil karya para mahasiswa tersebut, ada sebagian yang dikomersilkan.

“Sebagian juga sudah punya brand, ada beberapa yang memang punya manajemen penyewaan busana. Temen-teman punya bisnis seperti itu, punya katalog, mereka kelola brand teman-temannya, kebanyakan disewakan dan ada juga yang dijual,” pungkasnya.

Ajang Swastamita 2025 berlangsung semarak. Tak hanya Fashion Show, Exhibition, dan Showcase Bazaar, juga menghadirkan 110 designer mahasiswa Kriya Tekstil dan Fashion Telkom University dengan menampilkan hasil karya Tugas Akhir mahasiswa Angkatan 2021.

Lenuta Perkuat Kolaborasi Industri Tekstil dan Perhotelan Lewat Praktik Produksi Berkelanjutan

PT Nada Surya Tunggal (NST), produsen Lenuta Luxury Towel, menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui kegiatan Plant Tour di fasilitas produksinya di Ungaran, Kabupaten Semarang, pada Sabtu (18/10/2025). Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional Ikatan Housekeeper Indonesia (IHKA) 2025 dan mempertemukan para profesional perhotelan dengan dunia manufaktur tekstil.

Peserta berkesempatan menyaksikan langsung proses produksi Lenuta Luxury Towel, mulai dari tahap penenunan, pewarnaan, hingga quality control. Melalui kegiatan ini, Lenuta ingin memperlihatkan bagaimana kenyamanan dan efisiensi produk diwujudkan melalui praktik industri hijau dan berkelanjutan.

Sales & Marketing Supervisor Lenuta, Evelina Larisa Geraldy, menyatakan bahwa kelembutan produk Lenuta tidak hanya berasal dari bahan berkualitas, tetapi juga dari filosofi produksi yang menghormati alam dan tenaga kerja. “Kenyamanan sejati tumbuh dari proses yang menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (19/10/2025).

Sebagai perusahaan yang telah lebih dari 15 tahun beroperasi di industri tekstil Indonesia, PT Nada Surya Tunggal konsisten menerapkan prinsip green industry. Melalui sistem produksi berbasis O-Ecotech, perusahaan fokus pada efisiensi energi dan pengurangan limbah. Komitmen ini

mendapat pengakuan melalui perolehan sertifikat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam praktiknya, NST menggunakan mesin otomatis berteknologi tinggi untuk menjaga efisiensi dan konsistensi mutu produk. Perusahaan juga menggunakan pewarna berbasis air yang aman bagi kulit, serta dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar air buangan dapat kembali ke alam dalam kondisi bersih dan aman.

Development Supervisor PT Nada Surya Tunggal, Ivan Markus, menekankan bahwa pertumbuhan industri tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian alam. “Efisiensi dan penghematan air menjadi fokus kami agar produktivitas tidak mengorbankan lingkungan,” ujarnya.

Melalui kegiatan Plant Tour ini, Lenuta berharap dapat menginspirasi lebih banyak pelaku industri untuk menjadikan keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama. “Setiap produk yang nyaman digunakan seharusnya juga memberikan kenyamanan bagi bumi,” tambah Evelina.

Sebagai informasi, Lenuta Luxury Towel merupakan merek bath linen dan bed linen premium dari DSU Group yang dikenal karena kelembutan, ketahanan, dan proses produksinya yang ramah lingkungan. Produk-produk Lenuta telah dipercaya oleh hotel, spa, dan rumah tangga di seluruh Indonesia sebagai simbol kenyamanan elegan yang berpadu dengan tanggung jawab terhadap bumi.

IPKB Dukung Langkah Pemerintah Kendalikan Impor Ilegal demi Kebangkitan Industri Konveksi Nasional

Meningkatnya serbuan pakaian impor di pasar domestik membuat pelaku industri konveksi kecil dan menengah semakin terdesak. Di tengah tekanan tersebut, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menertibkan impor ilegal disambut positif oleh para pelaku usaha dalam negeri.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengungkapkan bahwa banjirnya produk impor, terutama yang masuk tanpa izin resmi, telah menyebabkan pangsa pasar konveksi lokal menyusut drastis. “Sejak pandemi Covid-19, sekitar 40 persen industri kecil dan menengah (IKM) konveksi gulung tikar, terutama di Jawa Barat. Situasi makin sulit karena produk impor tanpa pengawasan terus masuk ke pasar,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Nandi menjelaskan bahwa banyak produk pakaian jadi dari luar negeri beredar tanpa Perizinan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS). Hal ini tidak hanya menimbulkan persaingan tidak sehat, tetapi juga menciptakan distorsi harga yang merugikan pelaku usaha lokal.

Menurut IPKB, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024, menjadi langkah konkret dalam menata ulang tata niaga impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 27 Tahun 2025, yang mewajibkan importir melakukan verifikasi sebelum mendapatkan kuota impor.

“Kami dari IPKB mendukung penuh kebijakan ini. Jika arus barang ilegal bisa dikendalikan dan kebutuhan dasar IKM terpenuhi, produk

lokal pasti kembali berjaya di pasar domestik," tegas Nandi.

Ia menilai, pengendalian impor ilegal akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, mulai dari penguatan daya saing industri konveksi, penciptaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan penerimaan negara melalui bea masuk dan pajak.

Meski demikian, IPKB mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dan transparan dalam penerapan kebijakan ini. "Yang terpenting adalah pengawasan di lapangan. Jangan sampai pasar domestik kembali dibanjiri produk impor. Kalau kebijakan ini dijalankan dengan konsisten, industri konveksi nasional bisa bangkit lagi," pungkasnya.

Pemerintah Terapkan BMTP untuk Perkuat Daya Saing Industri Tekstil Nasional

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk benang kapas. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/2025 yang akan mulai berlaku pada awal November 2025, sebagai langkah strategis untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan akibat lonjakan impor.

Kebijakan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menemukan peningkatan signifikan impor benang kapas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak hanya terjadi secara absolut, tetapi juga relatif terhadap produksi domestik, sehingga menimbulkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Melalui PMK 67/2025, pemerintah menetapkan besaran BMTP dengan skema tarif menurun selama tiga tahun. Penurunan bertahap ini dimaksudkan sebagai masa transisi agar industri dalam negeri dapat menyesuaikan diri dengan persaingan global. Kebijakan tersebut mencakup produk benang kapas dengan pos tarif HS 5204, 5205, dan 5206, meliputi jenis benang carded, combed, serta benang campuran kapas.

Selain itu, BMTP diberlakukan terhadap impor dari seluruh negara, kecuali 120 negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam Lampiran B, dengan syarat importir dapat menunjukkan dokumen Certificate of Origin (CoO) yang sah. Apabila CoO tidak valid atau tidak diserahkan, maka BMTP tetap akan dipungut penuh. Regulasi ini juga menegaskan bahwa BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional seperti FTA dan CEPA.

Menariknya, kebijakan ini juga mencakup pengawasan terhadap barang yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, atau fasilitas kepabeanan lainnya, kecuali jika diatur berbeda oleh peraturan kawasan tersebut. PMK 67/2025 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 Oktober 2025 dan diundangkan pada 20 Oktober 2025, dengan ketentuan mulai berlaku sepuluh hari setelah tanggal pengundangan.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sebelumnya telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk membahas penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang terdampak oleh praktik impor ilegal dan dumping produk. Ketua APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu impor ilegal menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha tekstil.

Menurut Redma, integrasi rantai pasok industri tekstil nasional dari hulu hingga hilir saat ini terganggu akibat maraknya produk impor ilegal. Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang menunjukkan banyaknya barang impor yang tidak tercatat dalam sistem Bea Cukai, menimbulkan kerugian bagi negara dan pelaku usaha lokal.

APSyFI mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan serta memperbaiki prosedur penerimaan barang impor, terutama dengan mengoptimalkan sistem port-to-port manifest. Redma menilai masih terdapat celah dalam sistem, di mana importir dapat membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa merujuk pada Master Bill of Lading, sehingga membuka peluang terjadinya misdeclare, under invoicing, dan penyalahgunaan kode HS.

Kebijakan BMTP yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan terhadap industri tekstil nasional terus menjadi prioritas. Dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang terarah, diharapkan industri dalam negeri dapat memperkuat daya saingnya serta beradaptasi menghadapi tantangan perdagangan global.

API Waspadai Implementasi Kebijakan Bea Masuk Benang Kapas, Minta Pemerintah Konsisten di Lapangan

Kebijakan baru Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menetapkan bea masuk tambahan untuk impor benang kapas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 mendapat respons hati-hati dari pelaku industri tekstil nasional. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tidak serta-merta menolak, tetapi juga tidak memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menilai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga kelancaran rantai pasok nasional itu perlu diimplementasikan secara hati-hati. Menurutnya, aturan ini memiliki tujuan baik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi dan transparansi pelaksanaan di lapangan.

“Kalau saya sebagai Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melihat kebijakan tarif bea masuk tindakan pengamanan diatur di PMK Nomor 67 Tahun 2025 ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran rantai pasok nasional,” ujar Danang, Kamis (23/10/2025).

Meski begitu, Danang menegaskan bahwa dukungan penuh belum bisa diberikan tanpa jaminan implementasi yang benar-benar

konsisten. Ia menilai setiap kebijakan baru harus dijalankan secara terukur dan memperhatikan seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir agar tidak menimbulkan distorsi.

“Saya mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat daya saing industri nasional, sejauh implementasinya dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan kondisi rantai pasok industri, mulai dari hulu, antara, hingga hilir,” jelasnya.

Lebih lanjut, Danang menyoroti kekhawatiran klasik yang kerap terjadi di birokrasi, yakni adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Ia menilai potensi penyimpangan dan kebocoran dalam implementasi bisa mengurangi efektivitas kebijakan yang sejatinya dirancang untuk memperkuat industri nasional.

“Kekhawatiran kita pada gap antara regulasi dengan implementasi. Itu penyimpangan atau kebocoran yang terus-menerus terjadi di birokrasi kita,” tegasnya.

API berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran perumusan kebijakan, tetapi juga memastikan pengawasannya berjalan efektif. Menurut Danang, industri tekstil membutuhkan kepastian dan stabilitas agar bisa menyesuaikan diri terhadap kebijakan baru.

“API tidak mendukung dan tidak menolak. API mempertanyakan konsistensi kebijakan dengan implementasi kebijakan,” ujarnya menegaskan.

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan safeguard measures terhadap produk benang kapas setelah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menemukan adanya

lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. PMK Nomor 67 Tahun 2025 ini mulai berlaku 10 hari setelah diundangkan pada 20 Oktober 2025 dan akan diterapkan selama tiga tahun.

Berdasarkan beleid tersebut, tarif bea masuk tambahan ditetapkan sebesar Rp7.500 per kilogram pada tahun pertama, Rp7.388 per kilogram pada tahun kedua, dan Rp7.277 per kilogram pada tahun ketiga. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh negara, kecuali 120 negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam PMK 67/2025.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap industri pemintalan dalam negeri dapat kembali bergairah dan memperoleh perlindungan yang lebih kuat dari gempuran produk impor. Namun, bagi pelaku industri seperti API, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjamin penerapan yang konsisten, bersih, dan berpihak pada industri nasional.

Pedagang Thrift Pasar Senen Nilai Pakaian Lokal Kalah Kualitas dari Impor

Pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta Pusat, mengaku keberatan jika nantinya diwajibkan menjual produk tekstil lokal. Mereka menilai pakaian produksi dalam negeri masih kalah dari segi kualitas dan harga dibandingkan produk impor yang banyak diminati pembeli.

Dani, salah satu pedagang di Pasar Senen, mengatakan bahwa konsumen lebih tertarik membeli pakaian impor karena kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Sebaliknya, pakaian lokal dinilai kurang awet dan harganya lebih mahal. “Jual di sini tergantung peminatnya. Sekarang banyak yang cari impor. Kalau disuruh jual lokal bisa saja, tapi peminatnya kurang dan kualitasnya juga enggak bagus-bagus banget,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Ia mencontohkan, pakaian lokal sering kali cepat melar atau benangnya terlepas setelah beberapa kali dicuci, baik secara manual maupun menggunakan mesin cuci. “Biasanya setelah dicuci tiga kali, sudah mulai melar, atau ada juga yang gampang luntur,” katanya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Surni, pedagang lain yang juga menjual pakaian bekas impor. Ia menilai produk lokal sering kali tidak sebanding antara harga dan kualitasnya. “Pakaian lokal kadang harganya agak mahal, tapi kualitas masih kalah dari impor. Dipakai sering malah jadi melebar, kalau dicuci kadang makin lentur dan bahannya mudah luntur,” ujarnya.

Menurutnya, pakaian bekas impor tetap diminati karena sebagian besar berasal dari Jepang dan Korea Selatan. “Walaupun bekas, tapi kualitasnya lumayan karena diimpor dari Jepang dan Korea,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan menghentikan impor pakaian bekas yang masuk secara ilegal. Langkah ini diambil untuk melindungi industri dalam negeri serta menghidupkan kembali sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tekstil.

Purbaya menegaskan, setelah impor pakaian bekas ilegal ditindak, pasar seperti Pasar Senen tidak akan kehilangan pasokan. Pemerintah akan memastikan produk penggantinya berasal dari produsen dalam negeri. “Nanti kita isi dengan barang-barang dalam negeri. Tujuannya bukan untuk mematikan usaha, tetapi justru menghidupkan UMKM yang bisa menyerap tenaga kerja dan mendukung produksi lokal,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap produsen tekstil dalam negeri dapat bangkit kembali, sementara masyarakat tetap mendapatkan pilihan pakaian berkualitas dari hasil produksi lokal.

Pemerintah Pacu Pertumbuhan Industri Tekstil Lewat Lima Strategi Utama

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai pilar utama industri manufaktur nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Indonesia siap

menjadi mitra strategis sekaligus pusat inovasi dan pertumbuhan global industri tekstil, seiring dengan upaya pemerintah mendorong daya saing sektor ini di kancah internasional.

Dalam konferensi tahunan ITMF & IAF World Fashion Convention 2025 di Yogyakarta, Agus menegaskan bahwa sektor TPT Indonesia telah membuktikan ketangguhan dan adaptabilitasnya di tengah ketidakpastian global. Ia juga menampik anggapan bahwa industri ini merupakan sunset industry, karena data menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, industri TPT tumbuh 5,39 persen dan memberikan kontribusi sebesar 0,98 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Untuk mempertahankan momentum tersebut, Kemenperin menerapkan lima langkah strategis. Langkah pertama adalah memberikan kemudahan investasi dan perizinan melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS) terbaru yang mempermudah dan mempercepat proses perizinan secara transparan serta efisien.

Langkah kedua yaitu restrukturisasi mesin dan peralatan bagi industri TPT. Program ini mendorong perusahaan mengganti mesin lama dengan teknologi hemat energi, yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi sebesar 21,75 persen, efisiensi energi 11,86 persen, dan penyerapan tenaga kerja hingga 3,96 persen.

Ketiga, pemerintah menyalurkan skema Kredit Industri Padat Karya dengan total pembiayaan hingga Rp20 triliun pada tahun 2025. Dana ini ditujukan untuk membantu

sekitar 2.000 hingga 10.000 perusahaan, terutama produsen tekstil dan pakaian, dalam melakukan ekspansi dan menjaga stabilitas tenaga kerja.

Langkah keempat berupa pemberian fasilitas Masterlist impor barang modal. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk bagi perusahaan yang mengimpor mesin dan peralatan guna meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing.

Langkah kelima adalah pemberian berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam riset, pengembangan, serta pendidikan vokasi untuk mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Agus menegaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri TPT yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Ia juga menyoroti keberhasilan produk tekstil Indonesia di pasar ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Komoditas pakaian dan aksesori rajutan (HS 61) mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 1,86 miliar, melampaui nilai ekspor alas kaki yang mencapai USD 1,85 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, turut mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menghadirkan kebijakan berpihak pada industri padat karya. Menurutnya, konferensi dunia tersebut menjadi momentum penting bagi pelaku industri tekstil dan fashion global untuk berkolaborasi, berinovasi, dan memperkuat sinergi di tengah tantangan perubahan rantai pasok dan dinamika perdagangan dunia.

Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, industri tekstil Indonesia diyakini akan semakin kokoh menghadapi persaingan global serta bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan inovasi tekstil dunia.

Investasi Asal China Perkuat Industri Tekstil di Jepara, Serap Ribuan Tenaga Kerja

Industri tekstil di Jawa Tengah kembali menunjukkan geliat positif dengan beroperasinya pabrik baru milik PT Formosa Industrial Park di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Pabrik yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Senin (27/10/2025) ini merupakan bagian dari ekspansi Korrun Group, perusahaan asal China yang bergerak di bidang tekstil, tas, dan koper untuk pasar ekspor.

Korrun Group kini memiliki lima pabrik di Indonesia, empat di antaranya berlokasi di Jawa Tengah. Total tenaga kerja yang telah terserap dari keempat pabrik tersebut mencapai sekitar 20.000 orang. Kehadiran pabrik kelima di Jepara diharapkan semakin memperkuat kontribusi sektor padat karya terhadap perekonomian daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekspor nasional.

Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa investasi Korrun Group sejalan dengan

program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Menurutnya, kehadiran industri berorientasi ekspor seperti Formosa Industrial Park juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan besarnya investasi dari dalam maupun luar negeri, penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat, sehingga angka kemiskinan bisa kami tekan hingga di bawah 9 persen,” ujar Luthfi.

Untuk mendukung iklim investasi, Pemprov Jateng terus mengoptimalkan berbagai fasilitas, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, dan pengembangan kawasan industri. Langkah ini ditujukan agar ketersediaan tenaga kerja terampil dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Sementara itu, Founder Korrun Group, Fan Jinsong, mengungkapkan rencana perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi di Indonesia. Dalam beberapa tahun mendatang, pihaknya menargetkan total serapan tenaga kerja mencapai 50.000 orang. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai sangat kondusif bagi pengembangan investasi asing.

“Kami berencana meningkatkan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dengan memperluas kapasitas produksi,” kata Jinsong.

Secara keseluruhan, investasi di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Hingga kuartal III tahun 2025, nilai investasi di provinsi ini telah mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal. Dari capaian tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 326.462 orang, menandakan bahwa Jawa

Tengah semakin menarik bagi investor baik lokal maupun asing.

Industri Tekstil Indonesia Sedang Beradaptasi, Bukan Melemah

Industri tekstil dan garmen Indonesia dinilai masih memiliki daya saing kuat di tengah tantangan ekonomi global. Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menegaskan bahwa sektor ini tidak sedang melemah, melainkan sedang beradaptasi melalui investasi di bidang digitalisasi, efisiensi energi, dan keberlanjutan.

Menurut Anne, para pelaku industri terus berkomitmen menjaga daya saing global, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. “Kami ingin menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi. Kami terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi, dan sustainability untuk memastikan daya saing produk Indonesia di pasar global tetap kuat,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Meski menghadapi tekanan dari meningkatnya impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar pada 2024. Selain menjadi sektor berorientasi ekspor, industri ini juga

berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Anne menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keterbukaan pasar global. Ia menyebut peningkatan daya saing bisa dicapai melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, energi, dan rantai pasok tanpa harus mengandalkan kebijakan yang terlalu protektif.

Lebih lanjut, Anne menegaskan bahwa anggapan industri tekstil Indonesia tidak mampu bersaing di pasar internasional tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak perusahaan garmen nasional yang kini menjadi mitra utama bagi merek-merek global ternama dan telah memenuhi standar ketat internasional.

Terkait isu impor ilegal yang kerap dikaitkan dengan lemahnya industri dalam negeri, Anne meminta agar pihak-pihak yang menuduh memberikan bukti konkret kepada aparat berwenang agar masalah tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Dengan dukungan kebijakan fiskal dan industri yang tepat, para pengusaha yakin sektor TPT Indonesia dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan hijau yang mendorong ekspor berkelanjutan serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Kami percaya, masa depan industri tekstil Indonesia adalah masa depan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Tantangan yang ada hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,” tutup Anne.

De Licacy Industrial Asal Taiwan Investasikan US$1,1 Juta untuk Bangun Pabrik di Indonesia

Perusahaan tekstil asal Taiwan, De Licacy Industrial Co., resmi mengumumkan rencana investasi sebesar US$1,1 juta atau sekitar Rp18 miliar untuk pembangunan pabrik anak perusahaannya di Indonesia, PT Delight Industrial Indonesia.

Dalam laporan resmi perusahaan, dana tersebut terdiri atas US$1,089 juta yang dikucurkan langsung oleh De Licacy Industrial Co. dan US$11 ribu dari anak perusahaannya yang berbasis di Samoa, De Licacy (Samoa) Holdings Co.. Adapun struktur kepemilikan PT Delight Industrial Indonesia dipegang masing-masing oleh De Licacy Industrial sebesar 99 persen dan De Licacy (Samoa) Holdings sebesar 1 persen.

De Licacy Industrial merupakan perusahaan tekstil terbuka asal Taiwan yang memiliki sistem produksi terintegrasi, mencakup kegiatan pemintalan, penenunan, dan pencelupan kain tenun. Perusahaan ini dikenal berorientasi pada riset dan pengembangan (R&D) dengan fokus pada produksi kain fungsional untuk pakaian luar ruangan, olahraga, dan kasual, serta bahan dekorasi rumah.

Langkah investasi ini mencerminkan semakin besarnya minat investor asing terhadap potensi industri tekstil Indonesia yang terus berkembang. Dengan dukungan infrastruktur dan tenaga kerja kompetitif, Indonesia dinilai sebagai lokasi strategis bagi pengembangan pabrik baru yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik.

Serbuan Tekstil Ilegal Tanpa Merek Ancam Kelangsungan Industri Lokal

Masuknya barang-barang tekstil impor tanpa merek dengan harga murah semakin meresahkan pelaku industri dalam negeri. Fenomena ini membuat produsen lokal menjerit karena tidak mampu bersaing di pasar, terutama akibat praktik impor ilegal yang kian marak terjadi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa meningkatnya impor ilegal ini merupakan dampak dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk China. Akibat kebijakan tersebut, banyak produsen China yang memanfaatkan Indonesia sebagai jalur alternatif perdagangan melalui praktik transhipment, yakni memindahkan barang antarnegara untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia agar seolah-olah produk tersebut buatan lokal.

Menurut Redma, langkah ini tidak hanya ilegal di mata AS, tetapi juga membahayakan posisi Indonesia di perdagangan global. Jika praktik tersebut terbukti dilakukan di Indonesia, AS berpotensi mengenakan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia. Selain itu, produk impor ilegal tersebut masuk tanpa membayar pajak dan bea masuk, sehingga bisa dijual dengan harga sangat murah. Kondisi ini menyebabkan

produsen tekstil lokal kesulitan bersaing di pasar domestik.

Redma menekankan bahwa penegakan hukum menjadi kunci utama untuk menghentikan praktik impor ilegal. Ia menyoroti perlunya pembersihan internal di Bea Cukai agar terbebas dari oknum yang selama ini terlibat dalam praktik curang. Selain itu, ia mengusulkan perbaikan sistem kepabeanan dengan mengganti inland manifest menjadi master bill of lading dari negara asal agar potensi pemalsuan dokumen dapat ditekan. Setiap kontainer juga perlu dipindai dengan AI Scanner guna memastikan kesesuaian data dengan dokumen resmi, sekaligus menghapus sistem "jalur merah-hijau" yang sering menjadi celah penyimpangan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap arus barang impor. Ia menjelaskan bahwa banyak barang masuk ke Indonesia secara ilegal, bukan tanpa izin, tetapi dengan cara memperoleh izin yang tidak benar. Kondisi ini membuat harga barang impor jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

Danang juga menyoroti adanya ketimpangan data perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra seperti China dan Singapura, yang menunjukkan lonjakan signifikan impor ilegal. Diperkirakan ada sekitar 10.000 kontainer barang impor ilegal yang masuk setiap bulan, menyebabkan kondisi oversupply di pasar domestik dan menekan kapasitas produksi dalam negeri.

Meski demikian, Danang melihat adanya langkah positif dari pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 yang memperketat impor barang jadi, serta Peraturan Menteri Perindustrian terkait tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor

tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurutnya, dua regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata niaga impor dan melindungi industri lokal dari praktik curang para importir nakal.

Ia berharap implementasi kedua peraturan itu dilakukan secara konsisten agar Indonesia bisa terbebas dari praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional. Dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelaku industri tekstil lokal kembali memperoleh ruang tumbuh yang sehat di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Kemenperin Nilai Kontraksi IKI Tekstil Oktober 2025 sebagai Penyesuaian Normal di Pasar Global

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa kontraksi Indeks Kepercayaan Industri (IKI) subsektor tekstil pada Oktober 2025 disebabkan oleh penyesuaian stok di negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Nilai IKI subsektor ini tercatat sebesar 49,74 poin, turun ke bawah level ekspansi setelah beberapa bulan sebelumnya menunjukkan kinerja yang stabil.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, menjelaskan bahwa perlambatan terutama terjadi pada komponen pesanan baru. Hal ini disebabkan oleh langkah negara tujuan ekspor dalam menyesuaikan stok setelah

periode ekspansi besar pada awal tahun, serta pengaruh perubahan musim dan tren mode fesyen di pasar global.

“Kami memandang kondisi ini tidak menunjukkan pelemahan struktural, melainkan penyesuaian normal seiring dengan dinamika perdagangan global dan siklus permintaan tekstil internasional,” ujar Rizky dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, fenomena serupa juga dialami oleh negara produsen tekstil besar lainnya seperti China, India, dan Vietnam. Negara-negara tersebut juga tengah melakukan penyesuaian dalam siklus pengiriman dan efisiensi rantai pasok global. “Dalam konteks global, retailer internasional kini lebih banyak menerapkan sistem short term buying untuk menghindari penumpukan stok menjelang musim produksi 2026,” imbuhnya.

Meskipun terjadi perlambatan pada pesanan baru, Rizky menegaskan bahwa aktivitas industri tekstil nasional masih berjalan baik. Komponen produksi dan persediaan masih menunjukkan ekspansi, yang menandakan bahwa produk tekstil Indonesia tetap terserap oleh pasar.

Produsen dalam negeri juga dinilai berhasil beradaptasi dengan mengalihkan sebagian kapasitas produksinya ke pasar domestik dan industri pakaian jadi nasional yang justru berada pada fase ekspansi. Dukungan regulasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 turut memperkuat langkah ini dengan memperluas penyerapan bahan baku kain dari produsen lokal.

“Dari sisi investasi, kepercayaan terhadap sektor tekstil masih tetap tinggi. Pelaku industri melihat potensi jangka menengah sektor ini masih menjanjikan,” ujar Rizky.

Secara keseluruhan, Kemenperin mencatat bahwa IKI nasional pada Oktober 2025 tetap berada di level ekspansif, yakni sebesar 53,50 poin. Dua subsektor dengan kinerja terbaik pada periode tersebut adalah industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas.

Dengan demikian, meski subsektor tekstil mengalami tekanan jangka pendek, Kemenperin menilai kondisi ini merupakan bagian dari siklus normal dalam rantai perdagangan global, bukan tanda penurunan mendasar pada daya saing industri tekstil nasional.

Indonesia Diperhitungkan Jadi Pusat Inovasi Tekstil Dunia

Produsen serat dan benang Indonesia optimistis bahwa Indonesia akan menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan industri tekstil dunia. Optimisme ini didasari oleh pengalaman panjang Indonesia di sektor tekstil selama lebih dari empat dekade, serta struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menjelaskan bahwa keunggulan Indonesia terletak pada besarnya pasar dalam negeri serta kemampuan industrinya untuk mengolah bahan dari serat hingga menjadi produk garmen. “Market dalam negeri kita sangat besar dan

terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Sampai ke garmennya juga kita ada, karena tidak semua negara punya integrasi seperti itu," ujarnya dalam wawancara dengan Pro3 RRI, Kamis (30/10/2025).

Menurut Redma, Indonesia juga memiliki bahan baku utama seperti kanvas, rayon, dan polyester yang menjadi tulang punggung industri tekstil. Hal ini menjadikan Indonesia sejajar dengan negara besar seperti China dalam hal kapasitas industri tekstil. "Yang punya industri seperti ini itu ada Indonesia dan China. Tetapi Vietnam yang mendapat peran industri tekstil itu," katanya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam memajukan industri tekstil global. Menurutnya, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia telah menunjukkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan daya saing yang kuat di tengah tantangan ekonomi dunia. "Indonesia hadir bukan sekadar sebagai tuan rumah, tetapi sebagai mitra strategis yang siap berperan aktif dalam memajukan industri tekstil global," ujar Agus.

Agus juga menepis anggapan bahwa industri TPT merupakan sunset industry. Ia menyebutkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, industri tekstil nasional mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa industri TPT Indonesia masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional maupun global.

Langkah Pembatasan Impor Pakaian Bekas Dinilai Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional

Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membatasi peredaran pakaian bekas impor mendapat dukungan luas, termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Muslim Indonesia (Sarbumusi). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan industri tekstil dan garmen nasional yang tengah mengalami tekanan akibat maraknya arus impor pakaian bekas.

Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyebut langkah tersebut sebagai kebijakan yang “strategis dan telah lama ditunggu” oleh pelaku industri dan pekerja. Menurutnya, derasnya arus pakaian bekas impor telah memukul sektor padat karya, menyebabkan penurunan produksi hingga pemutusan hubungan kerja di berbagai pabrik tekstil dan garmen. “Industri tekstil dan garmen kita sedang terpuruk. Banyak perusahaan harus melakukan PHK karena pasar dibanjiri pakaian bekas impor. Kami mengapresiasi langkah Menteri Purbaya yang berani melindungi produsen lokal,” ujar Irham, Jumat (31/10/2025).

Irham menekankan pentingnya kebijakan pembatasan impor disertai dengan upaya reindustrialisasi nasional. Pemerintah, katanya, perlu mendorong investasi baru dan menghidupkan kembali sektor-sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Ia juga menegaskan bahwa pembatasan impor harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal.

“Bola sekarang ada di tangan Bea Cukai dan Barantin. Banyak laporan menunjukkan penyelundupan pakaian bekas lewat kode HS yang tidak akurat. Ini harus ditindak tegas,” ucapnya. Irham juga menyoroti perlunya

sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait agar pelaksanaan pembatasan impor berjalan efektif di lapangan.

Sarbumusi menilai langkah ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 7 persen. Menurut Irham, target tersebut hanya akan tercapai jika industri padat karya kembali bangkit dan menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja. “Kalau pemerintah mampu mengendalikan impor pakaian jadi, industri tekstil dalam negeri akan bangkit. Itu akan jadi bukti bahwa janji pertumbuhan 7% bisa diwujudkan,” tegasnya.

Rencana penerbitan aturan baru oleh Kementerian Keuangan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menertibkan perdagangan pakaian bekas impor yang marak di pasar daring dan jalur informal. Selain merugikan produsen lokal, peredaran barang bekas impor juga menimbulkan kekhawatiran soal kebersihan dan dampak lingkungan.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi antarinstansi dan pengawasan di pelabuhan. Tanpa pengawasan ketat, potensi penyelundupan dan salah klasifikasi barang impor dikhawatirkan tetap terjadi.

Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tegas dan pengawasan yang konsisten, pembatasan impor pakaian bekas diharapkan menjadi momentum kebangkitan industri tekstil nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi berbasis produksi dalam negeri.

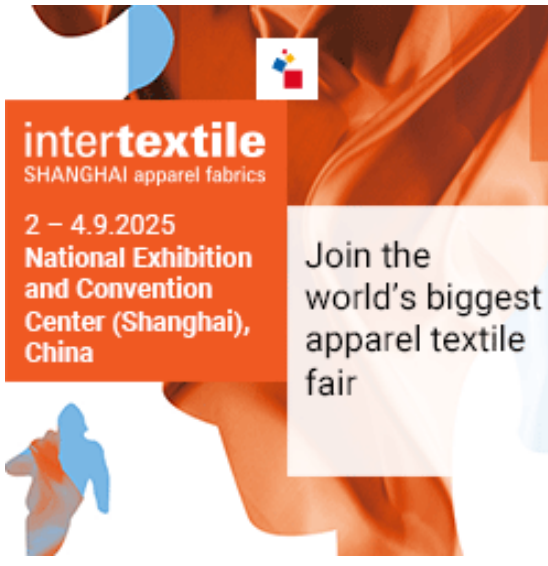
intertextile
SHANGHAI apparel fabrics
2 – 4.9.2025
National Exhibition and Convention Center (Shanghai), China
Join the world's biggest apparel textile fair